

# Evaluasi Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Kecamatan Koja Jakarta Utara

Fitriana <sup>1\*</sup>, Ika Lestari <sup>2</sup>, Amalia Sapriati <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Terbuka, Indonesia

\* [brianafitri@gmail.com](mailto:brianafitri@gmail.com)

## Abstract

The implementation of inclusive education aims to provide education for all, including children with special needs. The type of specialty that is most often encountered is slow learner. Adjustments need to be made by schools, both in terms of curriculum, educational facilities and infrastructure and learning systems. This is a separate obstacle in its implementation. The CIPP evaluation study used a descriptive qualitative method. Interviews, observations, questionnaires, and literature research became the research objects, and the research objects were principals and teachers. The results of the evaluation show that there is no element of inclusive education in school development plans and special budgets that have an impact on school management, without day-to-day financial or material assistance, without a curriculum tailored to the needs and development of students, and teachers ill-prepared to develop and implement plan Individual learning, school facilities and infrastructure that are not appropriate and the learning process is not in accordance with the accommodative curriculum. At the same time, the assessment criteria did not meet the minimum procedural standard criteria. Various aspects of the CIPP evaluation concluded that the readiness of schools to implement inclusive education still needs to be improved.

**Keywords:** *Evaluasi, Pendidikan Inklusi, CIPP, Sekolah Dasar*

## Pendahuluan

Penyelenggaraan pendidikan inklusi sudah dimulai sejak lama bahkan tercantum dalam UUD 1945, dipertegas dan digaungkan kembali sejak adanya Deklarasi Bandung. Sejak saat itu pendidikan untuk anak - anak berkebutuhan khusus mulai berkembang. Paparan (Alice dkk, 2016) tentang pendidikan inklusi yang dikutip Sunardi yaitu sebagai sistem pelayanan pendidikan luar biasa yang mempunyai syarat agar seluruh anak yang memiliki kebutuhan khusus dilayani di sekolah terdekat dalam satu ruang kelas, dengan teman sebayanya. Definisi yang senada juga menyebutkan jika sekolah inklusi merupakan sekolah yang menampung seluruh siswa dalam kelas yang sama sekolah ini memiliki program pendidikan yang menantang, layak, namun selaras pada kebutuhan maupun potensi semua murid (Widyawati, 2017). Selanjutnya pernyataan dari Salamanca (Salamanca Statement) sebagaimana yang dikutip oleh Budiyanto, terkait kebijakan, prinsip, maupun praktik pada pendidikan khusus dalam sistem penempatan pelayanan pendidikan untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus di sekolah reguler yang terdapat dalam lingkungan mereka dan sekolah itu difasilitasi dengan pelayanan penunjang dan pendidikan selaras pada kebutuhan ataupun potensi anak.

Dalam buku acuan umum pelaksanaan pendidikan inklusi dijelaskan jika tujuan pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia yaitu: 1) memberi peluang yang besar untuk memperoleh pendidikan yang layak selaras pada kebutuhan anak termasuk anak yang memiliki kebutuhan

khusus. 2) program wajib belajar pendidikan dasar. 3) meningkatkan kualitas pendidikan dasar maupun menengah sehingga mengurangi jumlah anak yang tidak naik kelas maupun putus sekolah. 4) menciptakan suatu sistem pendidikan yang saling menghargai keberagaman dengan tidak membeda-bedakan dan ramah pada pembelajaran. 5) sebagai pemenuhan amanat konstitusi.

Pada tahun 2017, Pemda DKI Jakarta meningkatkan pelayanan untuk pendidikan inklusi dengan mengeluarkan kebijakan penerimaan anak berkebutuhan khusus di sekolah negeri pada semua jenjang dengan jumlah 5% dari daya tampung tiap sekolah. Berdasarkan studi awal yang dilakukan dari beberapa sekolah dasar negeri pada Kec. Koja, yang merupakan sekolah umum yang menerima kebijakan pada tahun 2017 dalam Penerimaan Peserta Didik Baru secara online diperoleh kesimpulan bahwa sejak tahun 2017 jumlah peserta didik berkebutuhan khusus semakin meningkat mencapai lebih dari 10 anak. Jumlah tersebut didapat Ketika peserta didik berkebutuhan khusus tersebut mendaftar melalui jalur inklusi untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Namun, setelah pembelajaran berlangsung ternyata terdapat peserta didik yang berkebutuhan khusus yang mendaftar melalui jalur umum pada saat PPDB. Sehingga jumlah kuota peserta didik berkebutuhan khusus melebihi kuota yang sudah ditetapkan. Siswa berkebutuhan khusus tersebut teridentifikasi setelah proses pembelajaran berlangsung. Lamban belajar menjadi jenis kekhususan yang paling banyak ditemukan di sekolah - sekolah tersebut (Supena, 2017).

Salah satu jenis anak berkebutuhan khusus yaitu lamban belajar atau *slow learners* yang merupakan jenis kekhususan paling sering dijumpai di sekolah inklusi. Anak dengan jenis kekhususan tersebut mempunyai penampilan fisik yang tidak berbeda dengan anak normal. Namun anak dengan kekhususan Lamban belajar merupakan anak yang mempunyai kemampuan intelektual sedikit dibawah normal namun belum tergolong tunagrahita. Anak dengan prestasi belajar rendah atau sedikit di bawah rata – rata anak normal di seluruh area akademik dengan tes IQ berada di skor 70 – 90 merupakan anak dengan kekhususan lamban belajar seperti yang dijelaskan Cooter, Cooter Jr., dan Wiley (Triani, dkk, 2013). Anak dengan jenis kekhususan lamban belajar diidentifikasi memiliki skor IQ di antara 70 sampai 89 (Hartadi dkk, 2019). Backward atau *slow learners* merupakan istilah untuk anak yang tidak mampu mengerjakan tugas yang dapat dilakukan oleh anak pada seusianya seperti yang dijelaskan oleh Burt (Reddy dkk, 2006). Anak dengan jenis kekhususan lamban belajar yang mempunyai skor IQ 80 sampai 90 untuk materi pelajaran yang berhubungan dengan simbol, abstrak, atau materi konseptual akan lebih lambat menangkapnya (Fasha dkk, 2017). Sebagian besar anak dengan jenis kekhususan lamban belajar dalam pelajaran membaca dan berhitung mengalami hambatan atau masalah. Perkembangan intelektual pada anak akan berhubungan erat dengan tingkat kecerdasan atau skor hasil tes IQ anak dengan kekhususan lamban belajar. Mulyono (2003) menyebutkan bahwa anak dengan jenis kekhususan lamban belajar merupakan anak dengan kognitif yang lemah (*cognitive impairment*). Kenyataannya perubahan sekolah - sekolah reguler menjadi sekolah inklusi menemui banyak hambatan. Hambatan yang dialami pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusi yaitu dituntut untuk melakukan penyesuaian karena awalnya sekolah-sekolah reguler tersebut merupakan sekolah umum, baik berdasar sisi sarana, prasarana, sumber daya manusianya maupun kurikulum pendidikan atau sistem pembelajaran yang diselaraskan dengan kebutuhan siswa (Yasa dkk, 2018).

Berdasarkan hasil temuan awal serta beberapa kendala dan hambatan seperti yang telah dipaparkan maka untuk itu perlu diadakan evaluasi guna mengetahui seberapa jauh kesuksesan program pendidikan inklusi. Terutama penyelenggaraan program pendidikan inklusi untuk anak dengan kekhususan lamban belajar di Sekolah Dasar Kec. Koja Jakarta

Utara. Beberapa komponen yang perlu diamati sebagai bahan untuk mengukur efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program pendidikan inklusi pada Sekolah Dasar Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Pelaksanaan program pendidikan inklusif yang merupakan bagian dari sistem pendidikan dapat dilakukan dengan pendekatan sistem untuk mengidentifikasi komponen input, proses, dan output. Kebaruan dari penelitian ini adalah pendidikan evaluasi yang dilaksanakan di sekolah dasar.

## Metode

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian Evaluasi menggunakan model Contexts Input Proses Product untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di 4 sekolah yang mewakili tiap gugus sekolah dasar Wilayah Kecamatan Koja. CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam merupakan model evaluasi yang memberikan suatu format evaluasi yang komprehensif pada setiap tahapan evaluasi yaitu: tahap konteks, input, proses, dan produk. Evaluasi dilaksanakan dalam 4 tahap yakni: Evaluasi Konteks dengan menganalisis kebijakan dan tujuan yang ada, Evaluasi input berkaitan dengan pendidik, sarana prasarana, kurikulum, maupun kelengkapan administrasi, Evaluasi proses yang mencakup sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang berlangsung, Evaluasi Produk merupakan pengevaluasian hasil belajar peserta didik di ujian semester serta persentase kelulusan peserta didik saat mengikuti ujian akhir nasional. Berikut kriteria standar keberhasilan program.

*Tabel 1. Standar Minimal Keberhasilan*

Aspek	Standar Minimal Keberhasilan
Contex	1. Adanya kebijakan untuk landasan formal pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi anak dengan kebutuhan khusus jenis lamban belajar di sekolah minimal tercantum dalam kurikulum sekolah.
Input	2. Tujuan dari penyelenggaraan pendidikan inklusi minimal tercantum dalam kurikulum sekolah.
	1. Minimal 5% anak berkebutuhan khusus dari tiap rombongan belajar.
	2. Guru minimal telah mengikuti pelatihan pendidikan inklusi tentang anak berkebutuhan khusus jenis lamban belajar.
	3. Adanya modifikasi kurikulum yang dilakukan oleh guru untuk kegiatan belajar mengajar ABK khususnya lamban belajar.
	4. Sarana berupa ruangan berikut ruang keterampilan, ruang latihan bina diri, ruang penyimpanan alat, lapangan olahraga, ruang latihan fisik, ruang remesial teaching, ruang bina persepsi bunyi dan irama, ruang latihan bina wicara, ruang konsultasi, dan ruang asesmen.
Proses	5. Adanya kebijakan manajemen di kurikulum sekolah.
	1. Adanya Program Pembelajaran Individu (PPI) untuk ABK khususnya lamban belajar.
	2. Adanya modifikasi kurikulum untuk ABK khususnya lamban belajar.
Produk	3. Adanya modifikasi cara penilaian dan pelaporan hasil evaluasi ABK khususnya lamban belajar.
	1. Adanya perkembangan kemampuan akademik ABK khususnya lamban belajar.
	2. Adanya kemampuan berinteraksi dan bersosialisasi ABK khususnya lamban belajar.

Standar minimal keberhasilan ini merupakan modifikasi dari pedoman umum penyelenggaraan Pendidikan Inklusi yang dikeluarkan oleh Direktorat PPK – LK Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru kelas dan guru mata pelajaran. Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode berupa wawancara mendalam dan terstruktur, angket, studi dokumen, dan observasi. Sedangkan untuk instrument penelitian ini adalah angket, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu dengan metode wawancara, observasi, kuesioner dan studi dokumentasi.

## Hasil

Ketercapaian Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif Sekolah Dasar di Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Tingkat ketercapaian Pelaksanaan program sekolah inklusif secara menyeluruh pada Sekolah Dasar di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

*Tabel 2. Tabel Ketercapaian 4 Aspek Evaluasi*

No	Komponen	Indikator	Ketercapaian	Kesenjangan	Keterangan
1.	Konteks	1. Kesesuaian Kebijakan dengan tujuan dari penyelenggaraan pendidikan inklusi di Sekolah	58%	42%	perlu diperbaiki karena Kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi belum mencukupi untuk pengembangan program di sekolah.
		2. Tingkat pemahaman tentang Pendidikan inklusi dan kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan Pendidikan inklusi			
2.	Input	1. Adanya sumber daya manusia yang mendukung terselenggaranya pendidikan inklusi	46%	54%	perlu adanya perbaikan dalam hal Anggaran, Kurikulum, SDM, Sarpras
		2. Adanya anggaran untuk mendukung program pendidikan inklusi			
		3. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan program pendidikan inklusi			
		4. Adanya penggunaan kurikulum khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus			
3.	Proses	1. Adanya perencanaan pembelajaran khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus.	39%	61%	perlu perbaikan karena pembelajaran untuk peserta didik berkebutuhan khusus masih belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan inklusi
		2. Adanya sistem penilaian yang dilakukan guru untuk anak – anak berkebutuhan khusus.			
		3. Pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan.			
4	Produk	1. Adanya standar penilaian minimal dan SKL khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus.	66%	34%	perlu perbaikan dalam hal sistem penilaian dan pelaporannya
		2. Adanya sistem penilaian khusus yang dilakukan untuk peserta didik berkebutuhan khusus.			
		3. Adanya hasil belajar yang dapat digunakan untuk keberlanjutan pendidikan ke jenjang selanjutnya			

## **Pembahasan**

### ***Aspek Konteks***

Berdasarkan analisis hasil temuan dan wawancara untuk aspek konteks perlu diperbaiki karena Kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi yang ada hanya berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 116 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan ini belumlah cukup. Padahal menurut Steniback dan Steinback seperti yang dikutip oleh Sunardi memaparkan, sekolah inklusi ialah sekolah yang di dalamnya menampung seluruh siswa di satu kelas, dimana juga menyediakan pendidikan yang menantang dan layak, namun tetap sesuai akan kebutuhan serta kemampuan setiap siswa. Adanya penunjukkan sekolah secara langsung dan masuknya program pendidikan inklusi kedalam rencana pengembangan sekolah akan dijadikan landasan yang baik untuk pengimplementasi pendidikan inklusi di berbagai sekolah.

Sekolah juga belum memiliki surat penunjukkan sekolah sebagai SPPI (Sekolah Pelaksana Pendidikan Inklusi) dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang menyebabkan sekolah belum memasukan unsur-unsur pendidikan inklusi ke dalam rencana pengembangan sekolah. Hal ini berdampak pada manajemen pengelolaan Pendidikan inklusif di sekolah. Sedangkan menurut Edward III implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik jika struktur organisasi dan mekanisme melaksanakan yang SOP (standard operating procedur) yang ditetapkan dalam panduan program. Tidak adanya kebijakan dari sekolah yang tercantum dalam SK atau kurikulum sekolah dapat menghambat implementasi kebijakan, dimana kegagalan implementasi Pendidikan inklusi (Stainback, 2011).

### ***Aspek Input***

Aspek Input: Komponen input dalam evaluasi ini adalah komponen sebagai faktor pendukung yang menguatkan jalannya program pendidikan Inklusi terdiri dari:

#### 1) Anggaran untuk program pendidikan inklusi

Tidak adanya bentuk pembiayaan dan penganggaran untuk berjalannya program pendidikan inklusi, misalnya menganggarkan untuk membeli alat bantu belajar untuk anak – anak berkebutuhan khusus lamban belajar. Membangun serta menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus lamban belajar. Sehingga perlu adanya perbaikan dalam hal acuan anggaran khusus untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi yang harusnya menjadi suatu tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan pemerintah secara bersama. Namun, hanya beberapa sekolah yang mencantumkan komponen pendidikan inklusif ke dalam RAPBS/RAKS. Selain itu tidak adanya dukungan berupa bantuan dana maupun barang fisik yang rutin baik dari pihak pemerintah maupun swasta membuat anggaran untuk pendidikan inklusi tidak dikembangkan oleh pihak sekolah.

Kondisi tersebut menghambat penyelenggaraan Pendidikan inklusif karena mengacu pemaparan dari Edward III, sumber daya seperti staf dan fasilitas berperan krusial untuk pengimplementasi kebijakan. Terdapat pula keterbatasan anggaran untuk peserta didik berkebutuhan khusus termasuk pula kendala dalam pengimplementasi kebijakan, khususnya untuk beberapa program bagi anak dengan kekhususan lamban belajar semacam proses mengidentifikasi dan mengasesmen, ekstrakurikuler, serta sebagainya.

## 2) Kurikulum atau materi yang disampaikan,

Kurikulum yang ideal untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif yakni berupa sebuah kurikulum yang mampu mengakomodir kemampuan dan kebutuhan siswa sesuai akan kecerdasan, potensi, minat, dan bakatnya. Namun, temuan di lapangan menunjukkan kurikulum untuk pendidikan inklusi tidak dikembangkan menjadi kurikulum akomodatif yang seharusnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa dengan kekhususan lamban belajar. Implementasi kurikulum dalam pembelajaran anak dengan kekhususan lamban belajar masih belum terlaksana secara baik.

## 3) Kesiapan dari sumber daya manusianya dalam hal ini guru

Kompetensi untuk dapat melayani dan menyampaikan materi pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik inklusi dalam proses belajar mengajar erat kaitannya dengan pemahaman guru mengenai anak – anak berkebutuhan khusus, dan sikap penerimaan keragaman peserta didik yang berkebutuhan khusus. Hasil analisis temuan adanya kekurangsiapan guru sehingga belum mampu merancang kurikulum modifikasi, Menyusun Rencana Pembelajaran Individu sebagai bentuk pelayanan yang diberikan guru kepada peserta didik dengan kekhususan lamban belajar. Hal tersebut salah satunya disebabkan para guru belum memahami dan memiliki kemampuan yang memadai untuk mendidik anak dengan kekhususan lamban belajar karena guru belum mendapatkan pelatihan atau bimtek tentang pendidikan inklusi. Mereka hanya mengikuti kegiatan pelatihan tersebut hanya 1 topik pembahasan tentang anak – anak berkebutuhan khusus belum khusus bagaimana memahami dan memberikan pembelajaran untuk anak dengan kekhususan lamban belajar. Kesempatan untuk memperoleh pelatihan atau bimtek sebenarnya harusnya disediakan oleh pemerintah melalui dinas terkait sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk mewujudkan Pendidikan inklusif seperti yang tercantum dalam panduan Pendidikan Inklusif (Fuadi, 2015).

Tidak adanya GPK (Guru Pembimbing khusus) di juga menjadi salah satu hambatan karena masih belum sesuainya ketersediaan tenaga pendidik dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif, sebab secara umum belum adanya dukungan untuk sekolah penyelenggara dari tenaga ahli ataupun guru pembimbing khusus. (Budyanto, 2005) menjelaskan bahwa program tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna jika jumlah sumber daya manusia kurang, karena tidak ada pengawasan pelaksanaan program yang baik. Perbandingan jumlah GPK dengan jumlah ABK yang tidak sesuai, berakibat tidak terlaksananya program RPI dan pengembangan kurikulum adaptif. Anak ABK yang tidak mendapatkan pendampingan oleh guru pendamping khusus tidak memperoleh kesesuaian pembelajaran dengan kemampuan dan kebutuhan anak.

## 4) Sarana dan prasarana.

Berdasar hasil observasi terhadap sarana dan prasarana tersebut didapat hasil bahwa mayoritas sekolah tidak mempunyai sarana pendukung pelaksana pendidikan inklusi untuk anak lamban belajar di sekolah antara lain: ruang latihan bina diri, ruang sumber (*resource room*), ruang latihan fisik, ruang *remesial teaching*, ruang bina persepsi bunyi dan irama, ruang latihan bina wicara, ruang konsultasi, ruang asesmen, serta ruang khusus sesuai dengan kebutuhan dari kekhususan peserta didik. Kekurangsiapan sarana dan prasana sekolah pendukung pendidikan inklusi juga dirasakan di hampir semua sekolah. 3 sekolah dengan sarana dan prasarana yang sesuai sebab mengalami rehab total setelah tahun 2018 sehingga lingkungan yang aksesibilitas bagi disabilitas seperti Gedung dan ruang sudah ramah disabilitas. Kondisi tersebut bisa dilihat di antaranya dari handrail yang belum tersedia untuk siswa

tunakdaksa dan guiding block untuk siswa tunanetra, namun terdapat kekurangan dalam pengolahannya yaitu pemanfaatan yang belum optimal dan hanya berupa ruang tanpa dilengkapi alat – alat atau media yang dibutuhkan. Sehingga ruangan dan media serta alat – alat yang dibutuhkan untuk anak dengan kekhususan lamban belajar belum terpenuhi (Andriyani, 2017).

Untuk komponen input yang terkait dengan sarana prasarana menunjukkan kekurangan atau tidak adanya sarana prasarana khusus untuk anak dengan kekhususan lamban belajar. 2 sekolah yang merupakan sekolah yang merupakan bangunan baru hanya menunjukkan aksesibilitas untuk anak dengan kekhususan tuna daksa dan adanya ruangan namun tidak dilengkapi dengan alat ataupun media yang dibutuhkan khusus untuk anak dengan kekhususan lamban belajar. Sarana dan prasarana yang tidak ada ini bisa menjadikan pelaksanaan suatu program atau kebijakan terhambat dimana sesuai pemaparan dari Edward III hal tersebut dapat berdampak terhadap kualitas pelayanan.

### ***Aspek Proses***

Aspek Proses: Perlu perbaikan karena pembelajaran untuk peserta didik dengan kekhususan lamban belajar masih belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan inklusi disebabkan oleh guru yang belum membuat dan melaksanakan rencana pembelajaran individual (RPI), proses pembelajaran belum sesuai dengan kurikulum akomodatif, materi belajar yang sama dengan peserta didik normal, dan tidak adanya kerjasama dengan guru pendamping khusus (GPK) dalam proses pembelajaran karena tidak adanya guru GPK di sekolahnya. Sekolah juga belum menyelenggarakan program pengembangan keterampilan dan bakat untuk anak dengan kekhususan lamban belajar sesuai bakat dan minatnya, serta tidak adanya program kompensatoris. hal ini menjadi hambatan dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusif.

Menurut (Muh dkk, 2020) tujuan pendidikan inklusif yaitu untuk membangun bakat ilmiah dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Dengan keterampilan dan kemampuan yang berbeda-beda seharusnya guru menyesuaikan pengembangan bakat dengan kebutuhan masing-masing peserta didik, agar peserta didik bisa mengoptimalkan kemampuannya. Dengan demikian, haruslah ada peran aktif guru untuk merancang dan melakukan proses belajar mengajar sesuai akan kondisi kekhususan peserta didik berkebutuhan khusus.

### ***Aspek Produk***

Aspek Produk: Perlu perbaikan dalam hal sistem penilaian dan pelaporannya karena Masih adanya sekolah yang membuat standar penilaian yang digunakan belum memenuhi standar kriteria minimum program, dimana tidak adanya penentuan SKL dan KKM khusus di sekolah tersebut untuk anak dengan kekhususan lamban belajar serta tidak terdapat cara menentukan nilai kkm bagi peserta didik dengan kekhususan lamban belajar.

Sistem pelaporan, kebijakan khusus terkait dengan pengulangan kelas untuk anak – anak berkebutuhan khusus. Namun, masih ada beberapa sekolah yang mengambil kebijakan terkait dengan pengulangan kelas untuk anak berkebutuhan khusus yang tidak dibedakan dengan peserta didik normal. Terkait dengan teknik/strategi penilaian sebagian besar guru sudah melakukan modifikasi misalnya dengan melakukan penilaian portofolio, tes yang dimodifikasi dan penilaian berbasis kinerja agar peserta didik berkebutuhan khusus dapat memenuhi capaian KKM.

Sistem laporan hasil belajar di sekolah inklusi menurut buku pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi berwujud angka dengan terdapat deskripsi tulisan terkait penguasaan materi. Berdasarkan data dari hasil kuisioner serta wawancara bentuk pelaporan hasil evaluasi pembelajaran semua sekolah sudah dalam bentuk komentar naratif yang tidak hanya berupa angka saja. Namun, pelaporan hasil evaluasi pembelajaran dilaksanakan hanya pada saat pembagian rapot dilakukan, guru melakukan saat ada masalah dan hanya 13,4% guru yang rutin melaporkan perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus kepada orang tuanya. Laporan yang diberikan dari guru kepada orang tua anak berkebutuhan khusus jika dilakukan hanya 2 kali dalam setahun, hal ini bertentangan dengan (Tarmansyah, 2007) Peserta didik harus menerima laporan hasil belajar, bagi siswa yang belum menuntaskan KKM maka harus mengikuti program remedial.

Kriteria penentuan SKL bagi peserta didik berkebutuhan khusus termasuk sebuah upaya dalam menilai seberapa berhasilnya penyelenggaraan pembelajaran yang sudah dilakukan. Menurut Pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusi memaparkan bahwasanya sekolah inklusi haruslah memodifikasi SKL untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus dengan didasarkan kepada usia kronologisnya. Hasil analisis kuisioner dan wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah sudah secara khusus menentukan SKL untuk anak berkebutuhan khusus, dan sebagian sekolah juga telah berkerja sama dengan sekolah pada tingkat berikutnya untuk memastikan kelanjutan layanan pendidikan terkait. Banyaknya anak berkebutuhan khusus lamban belajar yang lanjut ke tingkat berikutnya karena seluruh anak di tiap sekolah mengikuti ujian sekolah dan lulus di tiap tahunnya. Mereka juga mendapatkan STTB yang diterbitkan oleh sekolah. Kondisi tersebut mendukung anak berkebutuhan khusus lamban belajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Temuan dari penelitian ini adalah adanya kekurangsiapan guru sehingga belum mampu merancang kurikulum modifikasi, Menyusun Rencana Pembelajaran Individu sebagai bentuk pelayanan yang diberikan guru kepada peserta didik dengan kekhususan lamban belajar.

Berdasarkan kendala – kendala yang ada saran berbentuk rekomendasi untuk pihak pemerintah dan sekolah terkait penyelenggaraan Pendidikan inklusif yang dapat dijadikan pertimbangan di antaranya: Memberikan surat penunjukkan sekolah sebagai SPPI sehingga program pendidikan inklusinya menjadi lebih terprogram dan masuk dalam dokumen pengembangan serta rencana kerja, kurikulum, dan RAPBS, pemberian pelatihan dan pendampingan untuk guru – guru mengenai penyelenggaraan pelatihan Pendidikan inklusi terutama untuk anak dengan kekhususan lamban belajar, Pengadaan GPK untuk tiap sekolah yang menyelenggaraan pendidikan inklusi, perlu perbaikan dalam memonitoring dan mengevaluasi dengan melibatkan secara aktif peran pengawas di tiap wilayah binaan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi, guru perlu membuat kurikulum akomodatif untuk anak dengan kekhususan lamban belajar serta mengimplemtasikan RPI dan Perlu perbaikan dalam kebijakan pelaporan dan kebijakan keberlanjutan ABK lamban belajar ke jenjang Pendidikan selanjutnya. Temuan dari penelitian ini adalah adanya kekurangsiapan guru sehingga belum mampu merancang kurikulum modifikasi, Menyusun Rencana Pembelajaran Individu sebagai bentuk pelayanan yang diberikan guru kepada peserta didik dengan kekhususan lamban belajar. Hal ini menjadi rekomendasi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti cara agar guru dapat mempersiapkan diri agar mampu merancang kurikulum modifikasi dan menyusun rencana pembelajaran.

## Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan dari tiap aspek evaluasi CIPP tersebut menunjukkan bahwa sekolah dasar di Kecamatan Koja terkait penyelenggaraan pendidikan inklusi khususnya untuk anak lamban belajar masih harus diperbaiki karena banyaknya kekurangsiapan dalam tiap aspek CIPP. Kekurangsiapan sekolah untuk memberikan pelayanan dan pembelajaran kepada anak dengan kekhususan lamban belajar ditunjukkan dari kurikulum yang digunakan, pengembangan anggaran, guru, proses pembelajaran, sistem penilaian dan sarana prasarana sekolah. Beberapa hal yang menjadi tantangan sekolah selama menyelenggarakan pendidikan inklusi yakni: pelatihan tentang pendidikan inklusi dan memahami anak berkebutuhan khusus lamban belajar serta cara memberikan pelayanan pendidikan pada anak dengan kekhususan lamban belajar termasuk dalam perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran, serta ketidaksiapan guru GPK di tiap sekolah dan sarana prasarana di sekolah sehingga menghambat penyelenggaraan pendidikan inklusi yang berpihak pada anak berkebutuhan khusus lamban belajar. Temuan dari penelitian ini adalah adanya kekurangsiapan guru sehingga belum mampu merancang kurikulum modifikasi, Menyusun Rencana Pembelajaran Individu sebagai bentuk pelayanan yang diberikan guru kepada peserta didik dengan kekhususan lamban belajar. Hal ini menjadi rekomendasi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti cara agar guru dapat mempersiapkan diri agar mampu merancang kurikulum modifikasi dan menyusun rencana pembelajaran

## Acknowledgment

-

## Daftar Pustaka

- Alice, A. dan Tim. (2016). Profil Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusif di Wilayah DKI Jakarta. *Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*.
- Andriyani, W. (2017). Implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar taman muda ibu pawayatan Yogyakarta. *Widia Ortodidaktika*, 6(3), 307-315.
- Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (Fokus: model MBKM program studi). *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 4(1), 195-205
- Budiyanto, (2005). Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal. *Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional*.
- Fasha, A. F., & Widowati, N. (2017). Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Koja Jakarta Utara (Studi pada Sdn Tugu Utara 11). *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(4), 300-311.
- Fuadi, K. (2015). Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Jakarta. *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 11(2), 1-30.
- Hartadi, D. R., Dewantoro, D. A., & Junaidi, A. R. (2019). Kesiapan Sekolah dalam Melaksanakan Pendidikan Inklusif untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar. *Jurnal Ortopedagogia*, 5(2), 90-95.

- Muh, A. S., & Uslan, U. (2020). Evaluasi Program Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Abdi Kasih Bangsa. *Musamus Journal of Primary Education*, 2(2), 102-112.
- Mulyono, M. (2003). Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar. *Jakarta: Rineka Cipta*
- Nani Triani & Amir. (2013). Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Lamban Belajar (Slow Learner). *Jakarta: Luxima*.
- Reddy, L. G., Ramar, R., & Kusuma, A. (2006). Slow Learners: Their Psychology and Instruction. *New Delhi: Discovery Publishing House*.
- Supena, A. (2017). Model Pendidikan Inklusif Untuk Siswa Tunagrahita di Sekolah Dasar. *Parameter*, 29(2), 145-155.
- Stainback. (2011). Modul Training of Trainers Pendidikan Inklusif. Banten: Departemen Pendidikan Nasional.
- Tarmansyah, S. (2007). Inklusi: Pendidikan Untuk Semua. *Jakarta: Dep. Pendidik dan Kebud. RI*
- Widyawati, R. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Inklusi Sekolah Dasar. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(1), 109-120.
- Yasa, R. B., & Julianto, J. (2018). Evaluasi Penerapan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar di Kotamadya Banda Aceh dan Kabupaten Pidie. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 3(2), 120-135.